

KEPEMIMPINAN CAMAT DALAM UPAYA MEMBANGUN KEMANDIRIAN DESA DI KECAMATAN KURAU KABUPATEN TANAH LAUT

Saifudin^a, Gazali Rahman^a, Istikhariyati Karima Gazali^a

^aFakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lambung Mangkurat

Email korespondensi: gazalirahman.fisip@ulm.ac.id

ABSTRAK

Latar belakang penelitian ini adalah bahwa kepemimpinan sebagai gejala sosial merupakan proses yang di dalamnya melibatkan beberapa elemen penting, yaitu pemimpin, pengikut (bawahan) dan situasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kepemimpinan camat, faktor-faktor yang mempengaruhinya dan model kepemimpinan camat yang paling sesuai dengan situasi dan kondisi struktur sosial masyarakat dalam upaya membangun kemandirian desa di bidang ekonomi, sosial dan kebudayaan di Kecamatan Kurau Kabupaten Tanah Laut. Metode penelitian yang dipakai adalah metode kualitatif dengan pendekatan partisipatoris, desain naratif, dan teknik pengumpulan data melalui : (1) studi dokumentasi untuk menggali data sekunder; (2) observasi; dan wawancara terbuka secara mendalam dengan informan kunci. Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk mencapai kepemimpinan pemerintah kecamatan yang efektif dalam menggerakkan dan meningkatkan partisipasi warga desa dalam pembangunan, paling sedikit ada tiga aspek pokok yang penting diperhatikan. Pertama, intensitas dan kualitas aspek fungsional kepemimpinan camat. Kedua, perilaku dan gaya kepemimpinan yang digunakan dalam menjalankan aktivitas dan peranan kepemimpinan camat. Ketiga, agar dalam menjalankan aktivitas fungsi dan peranan kepemimpinan maupun gaya kepemimpinan efektif untuk mempengaruhi atau meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa, maka perlu diperhatikan aspek nilai-nilai sosial dan budaya. Temuan lain dari penelitian ini adalah bahwa gaya kepemimpinan Camat Kurau bersifat situasional dan demokratis. Hal ini dipengaruhi oleh tingkat pendidikan masyarakat yang masih belum memadai dan struktur masyarakat di Kecamatan Kurau yang bersifat majemuk, karena umumnya warga masyarakatnya berasal dari hulu sungai (banua anam), seperti Kab. HSS, HST, HSU, Tapin dan daerah lainnya. Sehingga model kepemimpinan Camat Kurau lebih mengarah kepada model situasional yang demokratis dengan gaya ke "bapak"an. Hal ini tercermin dari sikap dan perilaku Camat Kurau yang selalu hadir di tengah-tengah warganya, selalu bersikap sebagai inisiator dan kurang menyukai suasana formal dan protokoler. Hal ini menimbulkan sikap dan pola kekerabatan yang akrab antara camat dengan bawahannya, antara camat dengan para kepala desa, antara camat dengan warga masyarakat di Kecamatan Kurau. Dalam upaya mewujudkan kemandirian desa di bidang ekonomi, sosial dan kebudayaan masih dalam proses dan sudah mulai terlihat hasilnya, meskipun terwujudnya kemandirian desa tersebut masih belum optimal.

Kata Kunci: Kepemimpinan, camat, Membangun, desa mandiri.

PENDAHULUAN

Dalam rangka untuk mencapai tujuan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, salah satunya adalah dengan cara membentuk pemerintahan negara yang profesional, handal, dan memiliki legitimasi serta diakui secara politik.

Untuk dapat membentuk pemerintah yang baik serta untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan nasional sebagaimana yang termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, diperlukan adanya peran serta dari aparatur pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Untuk mewujudkan pemerintah yang baik dan bertanggung jawab mulai dari tingkat pusat sampai dengan tingkat terendah yaitu pemerintah desa dan pemerintah kelurahan sebagai ujung tombak dari penyelenggaraan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang berada di bawah kecamatan, diperlukan adanya kepemimpinan yang mumpuni.

Kepemimpinan pemerintahan pada semua tingkat pemerintahan mempunyai peranan dan kedudukan yang strategis dalam usaha mewujudkan pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme serta akuntabel. Pemimpin pada setiap level pemerintahan, termasuk camat diharapkan memperhatikan, memahami, dan mampu menerapkan prinsip-prinsip manajemen pemerintahan dan prinsip-prinsip kepemimpinan yang berkualitas agar dapat mencapai tujuan pemerintahan yang dicitakan.

Kecamatan merupakan bagian dari struktur organisasi pemerintah daerah kabupaten atau kotayang dipimpin oleh camat dan dalam pelaksanaan tugasnya, camat memperoleh sebagian wewenang dari bupati/walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Guna efektivitas pelaksanaan otonomi daerah, ada beberapa peraturan perundangan-undangan yang mengatur tentang pemerintahdaerah, di antaranya adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, selanjutnya direvisi dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengamanatkan bahwa titik berat otonomi daerah adalah pada daerah kabupaten dan kota.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah menerangkan bahwa pemerintah daerah kecamatan merupakan wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten dan daerah kota, artinya sebelum berlakunya undang-undang tersebut, kecamatan hanyalah merupakan salah satu wilayah administrasi pemerintah saja, selain dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kotamadya dan kota administratif.

Dengan memandang kecamatan sebagai bentuk dan bagian dari struktur organisasi pemerintah daerah kabupaten/kota, maka kerja sama yang solid dan bersinergi sangat diperlukan untuk mencapai tujuan pemerintahan adalah merupakan upaya rasional yang harus dilakukan. Camat memiliki tugas dan tanggung jawab yang lebih khusus dibandingkan dengan perangkat daerah lainnya dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya untuk mendukung pelaksanaan azas desentralisasi yaitu adanya kewajiban untuk mengintegrasikan nilai-nilai sosial kultural, menciptakan stabilitas dalam dinamika politik, ekonomi, sosial dan budaya, pertahanan dan keamanan serta ketertiban dalam masyarakat.

Sebagaimana halnya dengan pimpinan organisasi lainnya, camat juga dihadapkan pada berbagai keadaan, situasi dan kondisi serta tantangan dalam memimpin wilayah kecamatan. Seorang camat dituntut untuk bersikap proaktif dan mengandalkan kepemimpinan yang berkualitas untuk membangkitkan semangat kerja para pegawai yang menjadi bawahannya, termasuk para lurah dan kepala desa dalam lingkup wilayah kecamatan yang dipimpinnya. Selain itu, juga harus mampu menggerakkan masyarakat untuk berperan aktif dan berpartisipasi secara nyata dalam pembangunan serta mampu menjadi kreator, inovator, dan fasilitator dalam rangka efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat serta pemberdayaan masyarakat khususnya masyarakat desa.

Fungsi utama camat adalah mewujudkan kesejahteraan rakyat dalam rangka membangun integritas kesatuan wilayah, selain memberikan pelayanan publik kepada masyarakat, juga melakukan tugas-tugas pembinaan wilayah. Dalam hal ini, secara filosofis pemerintah kecamatan tidak hanya diperkuat dengan aspek sarana dan prasarana, tetapi hal penting adalah adanya daya dukung kepemimpinan camat dalam meningkatkan kinerja pegawainya guna mewujudkan organisasi pemerintah kecamatan yang handal dan profesional dalam segala aspek.

Dengan demikian, seorang pemimpin harus menguasai dan ahli dalam manajemen organisasi agar dapat mengelola sumber daya organisasinya secara maksimal, seperti : Sumber Daya Manusia (SDM), sumber daya peralatan, sumber daya keuangan, sumber daya metode, sumber daya waktu, dan sumber daya lainnya. Hal ini tentu tidak terlepas dari keterampilan manajerial dalam penyusunan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan secara efektif, efisien, mandiri, dan akuntabel.

Berdasarkan uraian tugas dan kewenangan camat di atas, maka dapat dikatakan bahwa fungsi utama kepemimpinan camat selain memberikan pelayanan kepada masyarakat, juga melakukan tugas-tugas pembinaan wilayah dan sekaligus sebagai koordinator penyelenggara pemerintahan di wilayah kerjanya dan merupakan pemimpin yang selalu berusaha untuk meningkatkan kinerja pegawainya sebagai wujud nyata dari tujuan organisasi kecamatan.

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri No.158 tahun 2004 tentang Pedoman Organisasi Kecamatan, camat berkedudukan sebagai koordinator sekaligus sebagai pembina dan pengawas penyelenggaraan pemerintahan serta kegiatan desa/kelurahan dalam wilayah kerjanya, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada bupati/walikota.

Untuk mencapai kepemimpinan dalam pemerintah kecamatan yang efektif dalam menggerakkan dan meningkatkan partisipasi warga desa dalam pembangunan, paling sedikit ada tiga aspek pokok yang penting diperhatikan. Pertama, intensitas dan kualitas aspek fungsional kepemimpinan, yaitu memberi dorongan, pengarahan, bimbingan, interaksi komunikasi dua arah dan pelibatan warga dalam pembuatan

keputusan. Kedua, perilaku dan gaya kepemimpinan yang digunakan dalam menjalankan aktivitas dan peranan kepemimpinan. Ketiga, agar dalam menjalankan aktivitas fungsi dan peranan kepemimpinan maupun gaya kepemimpinan efektif untuk mempengaruhi atau meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa, maka perlu diperhatikan aspek nilai-nilai sosial dan budaya, khususnya tuntutan nilai-nilai budaya tradisional tentang pola perilaku interaksi hubungan kemasyarakatan dalam sistem hubungan kekerabatan di mana kepemimpinan itu berlangsung yang secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi pola perilaku interaksi antara pemimpin dan yang dipimpin (pengikut); dalam hal ini adalah pola hubungan (relasi) antara camat, kepala desa/lurah dan warga masyarakat desa.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada Pasal 224 Ayat (1), menyatakan bahwa tugas dan kewenangan yang dilimpahkan oleh bupati/walikota kepada camat meliputi :

1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (6).
2. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
3. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum.
4. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan PERDA dan PERKADA.
5. Mengkoordinasikan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum.
6. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di kecamatan.
7. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa/kelurahan.
8. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat daerah kabupaten/kota yang ada di kecamatan dan melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan uraian di atas, kepemimpinan camat dalam pelaksanaan pembangunan khususnya pembangunan desa sebagai salah satu upaya membangun kemandirian desa sangat dibutuhkan dan bersifat sangat strategis.

Pembangunan desa dilaksanakan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat menuju terwujudnya kemandirian masyarakat desa, sehingga dapat berdaya dan mengalami kemajuan di sektor ekonomi, politik, infrastruktur, sosial, dan budaya. Hal ini hanya dapat dicapai dengan tata kelola pemerintahan kecamatan yang baik yang merupakan supra struktur pemerintahan desa/kelurahan. Penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan kecamatan harus dapat menghimpun dan melibatkan seluruh elemen kekuatan lokal masyarakat dalam memajukan taraf hidup dan kehidupan masyarakat desa/kelurahan dalam lingkup wilayah kecamatan yang bersangkutan.

Melalui kepemimpinan camat yang handal dan profesional, maka perwujudan *good governance*

(GG) di tingkat desa, yang mensyaratkan adanya hubungan yang harmonis dan bersinergi antara 3 pelaku, yakni pemerintah desa, dunia usaha dan masyarakat. Masyarakat yang dapat bersinergi dengan kedua pelaku lain adalah masyarakat yang tidak sekedar melakukan apa yang diperintahkan Negara saja, bukan masyarakat yang tergantung terus, tetapi masyarakat yang berdaya, yakni masyarakat yang mandiri (*self help society*), yaitu mandiri secara ekonomi, politik, sosial dan kebudayaan.

Dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang ada, Pemerintah Kabupaten Tanah Laut melalui bupati telah melimpahkan sebagian kewenangan kepada para camat dalam wilayah Kabupaten Tanah Laut. Oleh karena itu, camat memiliki fungsi kepemimpinan yang dapat mengarahkan bawahannya, termasuk lurah dan kepala desa; untuk melakukan kegiatan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kecamatan Kurau sebagai salah satu kecamatan yang ada dalam wilayah Kabupaten Tanah Laut dengan luas wilayah 127,00 km² yang terdiri dari 11 desa adalah merupakan salah satu kecamatan yang menjadi lumbung padi bagi Kabupaten Tanah Laut pada khususnya dan Provinsi Kalimantan Selatan pada umumnya.

Permasalahan yang dihadapi oleh Kecamatan Kurau ini adalah masih banyaknya desa yang masih belum memiliki kemandirian ekonomi, sosial dan kebudayaan yang disebabkan oleh masih kurangnya fasilitas infrastruktur desa seperti jalan dan sarana prasarana lainnya. Selain itu, kualitas sumber daya manusia (SDM) juga masih belum memadai yang berdampak pada kurangnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.

Untuk itu, camat sebagai pemimpin pemerintah struktural di atas pemerintah desa mempunyai peran dan fungsi yang sangat strategis dalam upaya membangun kemandirian desa secara ekonomi, sosial dan kebudayaan.

Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian dengan judul : “Kepemimpinan Camat Dalam Upaya Membangun Kemandirian Desa di Kecamatan Kurau Kabupaten Tanah Laut” dirasa penting untuk dilaksanakan sebagai wujud partisipasi dan tanggung jawab moral dan akademik dalam mewujudkan kemandirian desa.

METODE PENELITIAN

Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Kecamatan Kurau Kabupaten Tanah Laut yang terdiri dari 11 desa. Dipilih kecamatan ini sebagai lokasi penelitian, karena kecamatan ini sebagian dari wilayahnya adalah kawasan pesisir pantai dan Daerah Aliran Sungai (DAS), yaitu Sungai Kurau yang menghubungkan wilayah Kecamatan Bati-Bati dan wilayah Kecamatan Kurau. Hal ini tentu sangat relevan dengan sub tema penelitian Bidang Praktis (Implementasi penelitian di lahan basah, biodiversity

lahan basah, metode pengolahan air, dll) dari Program Dosen Wajib Meneliti (PDWM) Universitas Lambung Mangkurat (ULM) melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) ULM tahun 2023.

Tipe Penelitian

Berdasarkan tinjauan pustaka dan kerangka pikir penelitian yang telah dikemukakan sebelumnya, maka tipe penelitian ini adalah tipe kualitatif, yaitu: bertujuan untuk mengeksplorasi dan menemukan serta memahami serta menganalisis secara mendalam fenomena kepemimpinan camat dan kemandirian desa dalam bidang ekonomi, sosial dan kebudayaan yang berada di kawasan pesisir pantai dan Daerah Aliran Sungai (DAS).

Penelitian ini bersifat non eksperimental, karena variasi pada setiap variabel tidak disebabkan oleh adanya perlakuan dari peneliti. Selain itu, dengan pendekatan partisipatoris, desain naratif, dan wawancara terbuka secara mendalam, maka permasalahan yang berhubungan dengan obyek penelitian dari para informan dikaji dan dianalisis secara mendalam. Sehingga ditemukan fakta yang bersifat final dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah terkait dengan kepemimpinan “Camat” dalam upaya membangun kemandirian desa di kawasan pesisir pantai dan Daerah Aliran Sungai (DAS) di Kecamatan Kurau Kabupaten Tanah Laut”, sebagai bagian dari sub tema penelitian Bidang Praktis (Implementasi penelitian di lahan basah, biodiversity lahan basah, metode pengolahan air, dll).

Informan Penelitian

Pemilihan informan dalam penelitian ini dilakukan secara *purposive sampling* yakni ditentukan orang-orang yang menjadi pelaku, pihak lain yang terkait dan berhubungan serta mempunyai pengetahuan tentang fokus penelitian. Adapun informan dalam penelitian ini adalah :

1. Dari kalangan Pemerintah Kecamatan Kurau :

a) Camat Kurau	: 1 orang
b) Sekretaris Kecamatan (Sekcam) Kurau	: 1 orang
c) Seksi Tata Pemerintahan	: 1 orang
d) Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum	: 1 orang
e) Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	: 1 orang
f) Seksi Kemasyarakatan	: 1 orang
g) Seksi Pelayanan	: 1 orang
h) Kelompok Jabatan Fungsional	: 1 orang
Sub Jumlah	: 8 orang

2. Dari kalangan masyarakat Kecamatan Kurau :

a) Tokoh masyarakat	: 2 orang
b) Tokoh agama	: 2 orang

- | | |
|-----------------|------------|
| c) Tokoh adat | : 1 orang |
| d) Tokoh pemuda | : 3 orang |
| e) Tokoh wanita | : 3 orang |
| Sub Jumlah | : 11 orang |
3. Dari kalangan Pemerintah Desa :
- | | |
|-------------------------------------|------------|
| a) Kepada Desa Kurau | : 1 orang |
| b) Sekretaris Sekretaris Desa Kurau | : 1 orang |
| c) Ketua BPD Kurau | : 1 orang |
| d) Wakil Ketua BPD Kurau | : 1 orang |
| e) Kepala Desa Kali Besar | : 1 orang |
| f) Sekretaris Desa Kali Besar | : 1 orang |
| g) Ketua BPD Kali Besar | : 1 orang |
| h) Wakil Ketua BPD Kali Besar | : 1 orang |
| i) Kepala Desa Padang Luas | : 1 orang |
| j) Sekretaris Desa Padang Luas | : 1 orang |
| k) Ketua BPD Padang Luas | : 1 orang |
| l) Wakil Ketua BPD Padang Luas | : 1 orang |
| Sub jumlah | : 12 orang |

Jumlah informan dalam penelitian ini sebanyak 31 orang.

Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Data Sekunder, yaitu: data yang diperoleh melalui studi kepustakaan baik berupa buku-buku, tulisan-tulisan ilmiah, dokumen-dokumen, laporan-laporan penelitian, peraturan perundang-undangan, foto-foto (gambar), cerita-cerita rakyat yang hidup dan berkembang dalam masyarakat serta lain-lain yang berhubungan dan ada relevansinya dengan objek penelitian.
2. Data Primer, yaitu: data empirik berupa informasi, keterangan, narasi, cerita, penuturan, dan lain-lain yang diperoleh secara langsung di lapangan atau lokasi penelitian melalui observasi dan wawancara langsung secara terbuka dan mendalam dengan informan penelitian.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah :

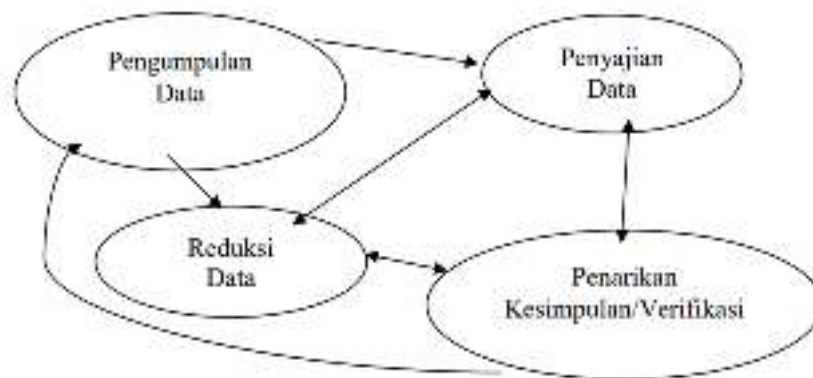
1. Wawancara terbuka dan mendalam, yaitu: teknik yang digunakan untuk memperoleh informasi, cerita-cerita, penuturan dan keterangan dari informan penelitian untuk menggali data secara mendalam.
2. Observasi, yaitu: teknik yang digunakan untuk melihat dan melibatkan diri secara langsung di lokasi

penelitian dengan metode *observer as participant* agar dapat menambah data dan informasi tentang hal-hal yang terkait dengan objek penelitian.

3. Studi Dokumentasi, yaitu: data sekunder seperti dokumen-dokumen, foto-foto, gambar, rekaman, cerita-cerita rakyat yang hidup dan berkembang di lokasi penelitian dan hal-hal lainnya yang relevan dengan fokus penelitian ini.

Teknik Analisis Data

Data primer dan data sekunder yang diperoleh dari penelitian ini dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif. Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah teknik model Miles dan Huberman, yang menegaskan bahwa analisis data terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan sebagai proses siklus dan bersifat interaktif yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Teknik ini secara visual digambarkan pada Gambar 1 di bawah ini.



Gambar 1 Komponen-komponen analisis data: model interaktif dari Miles dan Huberman

Rangkaian tiga alur kegiatan teknik analisis data model Miles dan Huberman adalah :

1. Reduksi data adalah merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data “kasar” yang diperoleh dari lapangan. Tujuannya agar dapat mempertajam analisis, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data sedemikian rupa agar lebih fokus sehingga dapat ditarik kesimpulan dan diverifikasi.
2. Penyajian data adalah sebagai “sekumpulan” informasi yang tersusun dalam bentuk teks naratif agar mudah dipahami dan memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.
3. Penarikan kesimpulan/verifikasi adalah kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, selanjutnya didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten pada tahap pengumpulan data di lapangan, sehingga kesimpulan yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah merupakan kesimpulan yang bersifat final dan kredibel.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kepemimpinan sebagai gejala sosial merupakan proses yang di dalamnya melibatkan beberapa elemen penting, yaitu pemimpin, pengikut dan situasi. Kepemimpinan pemerintahan padasemua tingkat mulai dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, pemerintah kecamatan, dan pemerintah desa/kelurahan, mempunyai kedudukan dan peranan yang strategis dalam usaha mewujudkan pemerintahan yang akuntabel, profesional, handal dan bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Oleh karena itu, maka pemimpin pada setiap level pemerintahan, termasuk camat diharapkan dapat memperhatikan, memahami dan mampu menerapkan prinsip-prinsip manajemen pemerintahan dan prinsip-prinsip kepemimpinan yang berkualitas agar dapat mencapai tujuan pemerintahan yang dicita-citakan, yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Kecamatan merupakan bagian dari struktur organisasi pemerintah daerah kabupaten atau kotayang dipimpin oleh camat dan dalam pelaksanaan tugasnya, camat memperoleh sebagian wewenang dari bupati/walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Guna efektivitas pelaksanaanotonomi daerah, ada beberapa peraturan perundangan-undangan yang mengatur tentang pemerintahdaerah, di antaranya adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, selanjutnya direvisi dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengamanatkan bahwa titik berat otonomi daerah adalah pada daerah kabupaten dan kota.

Dengan memandang kecamatan sebagai bentuk dan bagian dari struktur organisasi pemerintah daerah kabupaten/kota, maka kerja sama yang solid dan bersinergi harus diupayakan secara rasional karena sangat diperlukan untuk mencapai tujuan pemerintahan. Camat memiliki tugas dan tanggung jawab yang lebih khusus dibandingkan dengan perangkat daerah lainnya dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya untuk mendukung pelaksanaan azas desentralisasi yaitu adanya kewajiban untuk mengintegrasikan nilai-nilai sosial kultural, menciptakan stabilitas dalam dinamika politik, ekonomi, sosial dan budaya, pertahanan dan keamanan serta ketertiban dalam masyarakat.

Untuk mencapai kepemimpinan pemerintah kecamatan yang efektif dalam menggerakkan dan meningkatkan partisipasi warga desa dalam pembangunan, ada tiga aspek pokok yang harus diperhatikan.

Pertama, intensitas dan kualitas aspek fungsional kepemimpinan, yaitu memberi dorongan, pengarahan, bimbingan, interaksi komunikasi dua arah dan pelibatan warga dalam pembuatan keputusan.

Kedua, perilaku dan gaya kepemimpinan yang digunakan dalam menjalankan aktivitas dan peranan kepemimpinan.

Ketiga, agar dalam menjalankan aktivitas fungsi dan peranan kepemimpinan maupun gaya kepemimpinan efektif untuk mempengaruhi atau meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa, maka perlu diperhatikan aspek nilai-nilai sosial dan budaya, khususnya tuntutan nilai-nilai budaya tradisional tentang pola perilaku interaksi hubungan kemasyarakatan dalam sistem hubungan kekerabatan di mana kepemimpinan itu berlangsung yang secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi pola perilaku interaksi antara pemimpin dan yang dipimpin (pengikut); dalam hal ini adalah pola hubungan (relasi) antara camat dengan aparatur kecamatan; pola hubungan (relasi) camat dengan para kepala desa/lurah; dan pola hubungan (relasi) camat dengan warga masyarakat desa.

Kepemimpinan Camat Dalam Membangun Kemandirian Desa di Kecamatan Kurau Kabupaten Tanah Laut

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada Pasal 224 Ayat (1), menyatakan bahwa tugas dan kewenangan yang dilimpahkan oleh bupati/walikota kepada camat meliputi :

1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (6).
2. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
3. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum.
4. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan PERDA dan PERKADA.
5. Mengkoordinasikan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum.
6. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di kecamatan.
7. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa/kelurahan.
8. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah kabupaten/kota yang ada di kecamatan dan melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bertitik tolak dari ketentuan tersebut di atas, maka tugas dan kewenangan camat dapat diklasifikasi menjadi tiga, yaitu :

- a) Tugas dan kewenangan sebagai pimpinan (atasan) dari aparatur pemerintah kecamatan;
- b) Tugas dan kewenangan sebagai pimpinan (atasan) dalam pelaksanaan pemerintahan daerah terkait dengan otonomi daerah dalam wilayah kecamatan yang bersangkutan; dan
- c) Tugas dan kewenangan sebagai pimpinan (atasan) dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di tingkat desa/kelurahan.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dikatakan bahwa kedudukan camat dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta pemberdayaan masyarakat

sangat penting dan strategis. Karena titik berat otonomi daerah terletak pada daerah kabupaten/kota, maka kedudukan pemerintah kecamatan di bawah kepemimpinan camat adalah merupakan jembatan penghubung utama antara pemerintah kabupaten/kota dengan pemerintah desa/kelurahan.

Secara yuridis formal, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, para kepala desa/lurah berada langsung di bawah bupati/walikota, tetapi dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan daerah, pelaksanaan pembangunan desa, dan fungsi kemasyarakatan serta pemberdayaan masyarakat; pada realitanya para kepala desa/lurah dan masyarakat desa/kelurahan berada di bawah koordinasi dan pengawasan serta tanggung jawab camat sebagai kepala (pimpinan) wilayah kecamatan yang bersangkutan.

Berdasarkan temuan penelitian ini, realitas tersebut di atas terjadi pada Pemerintah Kecamatan Kurau Kabupaten Tanah Laut. Sehingga sudah saatnya pemerintah kecamatan tidak lagi dipandang hanya sebagai penyelenggara administrasi pemerintahan daerah saja. Karena banyak peran dan fungsi serta tugas yang harus dilaksanakan oleh seorang camat sebagai kepala (pimpinan) wilayah kecamatan.

Berdasarkan hasil wawancara dari para informan, dapat diketahui bahwa sebagai atasan langsung dari para aparatur Pemerintah Kecamatan Kurau Kabupaten Tanah Laut, maka dapat diketahui bahwa Bapak Zulpuaddin, S.Sos. selaku Camat Kurau yang dilantik pada tanggal 6 September 2021 oleh Bupati Tanah Laut : Bapak H. M. Sukanta, adalah merupakan tipe pemimpin yang beranggapan bahwa kepemimpinan sebagai sebuah proses kolektivitas. Artinya bahwa pemimpin adalah bagian yang tak terpisahkan dari bagian (unsur) kepemimpinan yang lain, yaitu pengikut (bawahan) dan situasi.

Karena kepemimpinan adalah kolektivitas dari pemimpin sebagai inti dari kepemimpinan, pengikut atau bawahan sebagai pihak yang turut menentukan dan sangat membantu pemimpin dalam upaya pencapaian tujuan dari kepemimpinan dan situasi sebagai hal yang berpengaruh dan menjadi dasar pertimbangan dalam operasionalisasi dari kepemimpinan. Sehingga hal ini yang menjadi dasar pemikiran, sikap, perilaku, dan perbuatan serta tindakan dari Camat Kurau yang berpandangan bahwa keberhasilan dalam pelaksanaan tugas dan kewajiban serta tanggung jawab beliau sebagai camat sangat ditentukan dan dibantu oleh segenap aparatur Pemerintah Kecamatan Kurau, para kepala desa dan seluruh elemen masyarakat di Kecamatan Kurau.

Pembahasan

Kepemimpinan Camat Dalam Membangun Kemandirian Desa

1) Bidang Ekonomi

Dalam upaya membangun kemandirian desa dalam bidang ekonomi, ada beberapa langkah dan strategi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kecamatan Kurau Kabupaten Tanah Laut. Yaitu :

- a) Melaksanakan Musrenbangdes pada semua desa yang ada dalam wilayah Kecamatan Kurau Kabupaten Tanah Laut.

Dalam upaya mewujudkan desa mandiri dan berdaulat dibutuhkan adanya sistem perencanaan yang terarah sesuai dengan kebutuhan dan dinamika masyarakat desa serta adanya pelibatan partisipasi segenap elemen masyarakat desa. Karena partisipasi masyarakat dalam pemerintahan dan pembangunan desa sangat diperlukan. Sebab pemerintahan dan pembangunan desa yang tidak melibatkan partisipasi masyarakat, tentu tidak akan dapat mewujudkan kapasitas pemerintahan desa yang mumpuni dan pembangunan desa yang tidak responsif serta tidak berkelanjutan.

Oleh karena itu, pelaksanaan MUSRENBANGDES (Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa) yang merupakan agenda rutin tahunan harus betul-betul dilaksanakan dengan sebaik-baiknya agar segenap aspirasi dan kebutuhan masyarakat desa dapat ditampung dan dibuatkan skala prioritasnya, dan selanjutnya diperjuangkan ke tingkat forum MUSRENBANGCAM di tingkat Kecamatan Kurau oleh seluruh Kepala Desa, forum SKPD dan forum MUSRENBANGKAB di tingkat Kabupaten Tanah Laut diperjuangkan oleh Pemerintah Kecamatan Kurau di bawah koordinasi dan arahan langsung dari Camat Kurau. Umumnya prioritas sarana dan prasarana pembangunan yang ada dalam data MUSRENBANGDES dan MUSRENBANGCAM Kecamatan Kurau Kabupaten Tanah Laut sebagian besar dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.

b) Mengoptimalkan pemanfaatan dana desa

Tujuan disalurkan Dana Desa adalah sebagai bentuk komitmen negara dalam melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis. Dengan adanya dana desa, desa dapat menciptakan pembangunan dan pemberdayaan desa menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.

Dana desa diprioritaskan untuk pembiayaan pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal desa dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup masyarakat serta penanggulangan kemiskinan. Prioritas dana desa dialokasikan untuk membiayai bidang pemberdayaan masyarakat didasarkan atas kondisi dan potensi desa, sejalan dengan pencapaian target RPJMDes dan RKPDes setiap tahunnya. Berdasarkan data dan informasi yang diperoleh, alokasi Dana Desa di Kecamatan Kurau Kabupaten Tanah Laut diprioritaskan untuk hal-hal berikut :

- Pemenuhan kebutuhan dasar, meliputi:
 - ✓ Pengembangan pos kesehatan Desa dan Polindes;
 - ✓ Pengelolaan dan pembinaan Posyandu; dan
 - ✓ Pembinaan dan pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- Pembangunan sarana dan prasarana desa, diantaranya dapat meliputi:
 - ✓ Pembangunan dan pemeliharaan serta peningkatan sarana dan prasarana jalan desa;

- ✓ Pembangunan dan pemeliharaan serta peningkatan sarana dan prasarana Jalan Usaha Tani (JUT);
 - ✓ Pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan;
 - ✓ Pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala desa antara lain sumur bor.
- c) Pengembangan potensi ekonomi lokal guna meningkatkan kapasitas masyarakat desa dalam pengembangan wirausaha, peningkatan pendapatan, dan perluasan skala ekonomi masyarakat desa, melalui pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Berdasarkan data dan informasi yang diperoleh, usaha pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kecamatan Kurau Kabupaten Tanah Laut masih dalam tahap pembentukan dan masih belum memberikan hasil yang optimal. Selain terkendala permodalan, juga disebabkan oleh belum adanya terobosan jenis usaha yang dapat bersaing dengan unit-unit usaha milik perorangan dan pihak swasta. Khusus di Desa Kali Besar, terdapat unit pengolahan jengkol (jaring) yang masih perlu lebih ditingkatkan kuantitas dan kualitas pengolahannya, misalnya dengan kemasan yang lebih menarik dan higienis agar pemasar dapat menjangkau pasar yang lebih luas, misalnya supermarket, minimarket dll.
- d) Perluasan usaha petanian secara intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian di Kecamatan Kurau Kabupaten Tanah Laut adalah :
- ✓ Program Cetak Sawah hasil kolaborasi antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut;
 - ✓ Program penyaluran pupuk bersubsidi;
 - ✓ Pengoptimalan bibit padi lokal (Unus Mayang);
 - ✓ Pembangunan tanggul untuk pertanian di wilayah Desa Kurau yang akan dilaksanakan pada tahun 2024; dan
 - ✓ Penyediaan tenaga Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Pertanian pada setiap desa.

2) Bidang Sosial

Penduduk Kecamatan Kurau Kabupaten Tanah Laut 99 % beragama Islam dan merupakan warga masyarakatnya bersifat agamis. Hal ini tentu merupakan modal sosial dalam pelaksanaan pembangunan pada umumnya dan pembangunan desa pada khususnya. Terkait upaya mewujudkan kemandirian desa dalam bidang sosial ini, Pemerintah Kecamatan Kurau Kabupaten Tanah Laut di bawah kepemimpinan Camat Kurau mengupayakan terlaksananya dengan baik dan lancar setiap kegiatan keagamaan, seperti pengajian-pengajian rutin yang dilaksanakan oleh majelis-majelis taklim yang ada di Kecamatan Kurau, pengajian-pengajian yang dilaksanakan oleh mesjid-mesjid, langgar-langgar, dan mushola-mushola yang ada pada setiap desa di Kecamatan Kurau.

Dimensi modal sosial yang ada di Kecamatan Kurau lebih ke arah pembangunan solidaritas sosial, di mana pembangunan kebiasaan gotong royong di desa, keberadaan ruang publik terbuka bagi warga

yang tidak membayar, ketersediaan fasilitas atau lapangan olahraga, dan terdapat kelompok kegiatan olahraga yang dimotori oleh Karang Taruna di tingkat desa.

Selanjutnya upaya untuk menghidupkan rasa toleransi yang tinggi terhadap perbedaan yang terjadi di desa-desa. Karena struktur masyarakat di Kecamatan Kurau adalah cukup majemuk, karena umumnya sebagian besar warga masyarakatnya berasal dari daerah “hulu sungai” (Banua Anam : Kab. Tapin; Kab. HSS; Kab. HST; Kab. HSU; Kab. Balangan; dan Kab. Tabalong). Warga masyarakat berkomunikasi sehari-hari menggunakan bahasa yang sama, dan terciptanya rasa kekeluargaan yang tinggi, karena sejatinya mereka berasal dari nenek moyang yang sama, yaitu “Urang Hulu Sungai”.

Dalam upaya menciptakan rasa aman penduduk di Kecamatan Kurau, ada sejumlah kegiatan yang telah dilaksanakan secara berkesinambungan, seperti : membangun pemeliharaan Poskamling-Poskamling di lingkungan pada setiap desa dengan pola Siskamling, sehingga tingkat kriminalitas dapat diminimalkan bahkan hampir tidak terjadi di desa-desa, kalau terjadi konflik di desa; maka akan diupayakan penyelesaiannya melalui musyawarah mufakat dengan difasilitasi oleh (1) Kepala Desa; (2) Tokoh Masyarakat; dan (3) Camat Kurau.

3) Bidang Kebudayaan

Pemerintah Kecamatan Kurau dan Pemerintah Desa serta warga masyarakat di Kecamatan Kurau Kabupaten Tanah Laut tetap menjaga nilai-nilai kolektif desa dan kearifan lokal desa serta budaya bangsa yang masih hidup di pedesaan seperti musyawarah mufakat dan gotong royong serta nilai-nilai masyarakat Indonesia seperti hidup rukun, rajin, tekun, disiplin, pekerja keras, pantang menyerah dan tidak mudah putus asa, sederhana, dan punya daya tahan yang tangguh. Dari hal ini tercermin kolektivitas masyarakat di desa yang bertumpu pada bentuk dan pola komunalisme, kearifan lokal, keswadayaan sosial, teknologi tepat guna, kelestarian lingkungan, dan ketahanan sertakedaulatan lokal yang merupakan perwujudan dari masyarakat yang agamis.

Adapun bentuk seni budaya yang hidup dan berkembang di Kecamatan Kurau antara lain adalah: pencak silat khas Kalimantan Selatan, yaitu Kuntau. Kemudian bentuk seni budaya lainnya adalah hadrah, grup maulid, kuda gepang, dan lain-lain.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepemimpinan Camat Kurau Kabupaten Tanah Laut Dalam Upaya Membangun Kemandirian Desa

Ada beberapa faktor yang berpengaruh terhadap kepemimpinan Camat Kurau Kabupaten Tanah Laut dalam upaya membangun kemandirian desa baik di bidang ekonomi, sosial dan kebudayaan. Faktor-faktor tersebut ada yang bersifat mendukung atau menunjang kepemimpinan camat dan sebaliknya ada juga faktor-faktor yang bersifat menghambat jalannya proses kepemimpinan camat.

Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat diidentifikasi ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kepemimpinan Camat Kurau Kabupaten Tanah Laut dalam upaya mewujudkan

kemandirian desa dalam bidang ekonomi, sosial dan kebudayaan. Adapun faktor-faktor tersebut adalah :

a) Faktor Internal

Merupakan faktor yang berasal dari dalam organisasi Pemerintahan Kecamatan Kurau Kabupaten Tanah Laut. Adapun faktor internal yang mempengaruhi kepemimpinan camat dalam upaya mewujudkan kemandirian desa dalam bidang ekonomi, sosial dan kebudayaan adalah:

1) Faktor kemampuan personal

Yang sangat menonjol adalah inteligensi. Umumnya pemimpin akan mempunyai taraf inteligensi yang lebih tinggi daripada yang dipimpin. Selain itu ada karakteristik lain seperti kecerdasan dan motivasi.

Pengertian kemampuan personal adalah kombinasi antara potensi sejak pemimpindilahirkan ke dunia sebagai manusia dan faktor pendidikan yang ia dapatkan. Jika seseorang lahir dengan kemampuan dasar kepemimpinan, ia akan lebih hebat jika mendapatkan perlakuan edukatif dari lingkungan, jika tidak, ia hanya akan menjadi pemimpin yang biasa dan standar. Sebaliknya jika manusia lahir tidak dengan potensi kepemimpinan namun mendapatkan perlakuan edukatif dari lingkungannya akan menjadipemimpin dengan kemampuan yang standar pula. Dengan demikian antara potensibawaan dan perlakuan edukatif lingkungan adalah dua hal tidak terpisahkan yang sangatmenentukan hebatnya seorang pemimpin.

2) Pendidikan dan pengalaman

Sebagai lulusan Sarjana, Camat Kurau Kabupaten Tanah Laut memiliki dasar pendidikan formal yang dapat mencakup bidang administrasi publik, pembangunan, ataudisiplin ilmu terkait. Pendidikan Sarjana memberikan fondasi teoritis yang kuat, memungkinkan Camat Kurau Kabupaten Tanah Laut untuk memahami prinsip-prinsip manajemen, perencanaan strategis, dan kebijakan publik. Hal ini merupakan bekal pengetahuan yang diperlukan untuk merancang dan melaksanakan program-program desa.

Selain itu, pengalaman lapangan menjadi krusial bagi seorang Camat KurauKabupaten Tanah Laut. Meskipun lulusan sarjana memiliki pemahaman teoritis, pengalaman jabatan-jabatan sebelumnya, dan pengalaman praktis di lapangan memungkinkan Camat Kurau Kabupaten Tanah Laut dapat mempraktikkannya dalam konteks nyata di desa-desa. Hal ini tentu sangat membantu Camat Kurau Kabupaten Tanah Laut dalam memahami dinamika masyarakat setempat, berinteraksi dengan beragam pemangku kepentingan, dan merancang solusi yang sesuai dengan kebutuhan khusus masyarakat dan pemerintahan desa.

Dengan demikian, kombinasi latar belakang pendidikan formal sebagai lulusan sarjana dan pengalaman jabatan serta pengalaman lapangan akan memperkuat kemampuan Camat Kurau

Kabupaten Tanah Laut dalam memimpin dan membangun kemandirian desa secara holistik baik di bidang ekonomi, sosial dan kebudayaan.

3) Kemampuan dalam berkomunikasi secara internal dan eksternal

Dalam konteks kepemimpinan Camat Kurau Kabupaten Tanah Laut yang lebih mengarah kepada model situasional yang demokratis dengan gaya ke"bapak"an, kemampuan komunikasi internal dan eksternal menjadi faktor kunci dalam upaya membangun kemandirian desa.

a. Komunikasi Internal

(a) Kerabat dan Akrab

Gaya ke"bapak"an Camat Kurau Kabupaten Tanah Laut dapat menciptakan lingkungan kerja yang akrab dan penuh kekeluargaan di internal. Kemampuan berkomunikasi yang baik memperkuat hubungan antara camat, staff, dan bawahan, memotivasi keterlibatan aktif dalam proses pembangunan desa.

(b) Inisiatif Bersama

Camat Kurau Kabupaten Tanah Laut sebagai inisiator dalam komunikasi internal mendorong partisipasi aktif semua pihak, memastikan ide dan solusi bersama dikembangkan, dan menciptakan rasa memiliki terhadap tujuan pembangunan desa.

b. Komunikasi Eksternal

(a) Keterlibatan Masyarakat

Kehadiran Camat Kurau Kabupaten Tanah Laut di tengah masyarakat memperkuat hubungan dengan warga desa. Kemampuan berkomunikasi secara efektif memungkinkan camat mendengarkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat, serta menjelaskan kebijakan dan program pembangunan desa dengan jelas.

(b) Hubungan dengan Pemangku Kepentingan

Camat Kurau Kabupaten Tanah Laut dapat menjalin hubungan yang baik dengan pemangku kepentingan eksternal seperti lembaga pemerintahan, organisasi masyarakat, dan sektor swasta. Kemampuan berkomunikasi dengan berbagai pihak ini dapat mendukung kolaborasi dan dukungan proyek-proyek pembangunan desa.

Dengan gaya ke"bapak"an yang menciptakan suasana akrab dan inisiatif dalam komunikasi, Camat Kurau Kabupaten Tanah Laut dapat membangun hubungan yang solid, memotivasi partisipasi aktif, dan memperkuat kemandirian desa melalui koordinasi yang efektif.

4) Kemampuan dari para bawahan

Faktor kemampuan dari para bawahan memainkan peran penting dalam upaya membangun kemandirian desa. Berikut adalah beberapa faktor yang mempengaruhi kepemimpinan Camat Kurau Kabupaten Tanah Laut terkait dengan kemampuan bawahan:

a. Partisipasi Aktif

Camat Kurau Kabupaten Tanah Laut dapat menciptakan lingkungan kerja yang akrab dan demokratis dengan mendorong partisipasi aktif dari para bawahan. Kemampuan bawahan untuk berkontribusi secara maksimal sangat penting dalam merancang dan melaksanakan program pembangunan desa.

b. Keterlibatan Dalam Pengambilan Keputusan

Model kepemimpinan demokratis menekankan keterlibatan bawahan dalam proses pengambilan keputusan. Kemampuan para bawahan dalam memberikan masukan dan pandangan mereka memperkaya kebijakan dan strategi yang diimplementasikan.

c. Kemampuan Berkomunikasi

Bawahan yang memiliki kemampuan komunikasi yang baik dapat lebih efektif dalam menyampaikan ide, masukan, dan permasalahan yang dihadapi di tingkat desa. Hal ini mendukung proses koordinasi dan implementasi program pembangunan.

d. Adaptabilitas dan Kreativitas

Kemandirian desa seringkali membutuhkan solusi yang inovatif dan adaptif. Kemampuan bawahan untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan dan menghasilkan ide-ide kreatif dapat memperkuat efektivitas program pembangunan.

e. Hubungan Kekerabatan

Kehadiran Camat Kurau Kabupaten Tanah Laut yang bersifat ke"bapak"an ini dapat menciptakan hubungan kekerabatan yang akrab antara camat dan bawahan. Faktor ini dapat meningkatkan kepercayaan, kolaborasi, dan keterlibatan bawahan dalam upaya memajukan desa.

Dengan memperhatikan dan memperkuat kemampuan bawahan, Camat Kurau Kabupaten Tanah Laut dapat memastikan bahwa timnya memiliki kapasitas yang optimal untuk mencapai tujuan kemandirian desa dengan lebih efektif.

b) Faktor Eksternal

1) Struktur sosial ekonomi masyarakat

Struktur sosial ekonomi masyarakat di Kecamatan Kurau adalah merupakan masyarakat yang berasal dari "hulu sungai" (banua anam), yaitu berasal dari Rantau, Kandangan, Amuntai, Barabai, Tanjung, Balangan, dan daerah lainnya. Secara umum memiliki karakter, gaya, sikap, tutur kata, dan lain-lain yang berbeda-beda. Untuk itu diperlukan adanya perlakuan yang sifatnya khusus dan tidak bisa dipandang sama. Hal ini tentu menjadi tantangan tersendiri bagi Pemerintah Kecamatan Kurau khususnya Camat Kurau dalam melakukan hubungan dan interaksi dengan warga masyarakat.

Mayoritas penduduk di Kecamatan Kurau bekerja sebagai petani, hal ini tentu berdampak pada gaya dan model kepemimpinan Camat Kurau dalam menjalankan roda Pemerintahan Kecamatan

Kurau. Secara umum dapat dikatakan, bahwa masyarakat di Kecamatan Kurau umumnya masih bersikap kurang responsif dengan situasi dan kondisi yang ada. Sehingga hal ini memerlukan adanya kepemimpinan pemerintahan yang aktif dan penuh suasana ke “bapak an” pada semua tingkatan, baik di tingkat desa maupun di tingkat kecamatan. Selain itu, gaya kharismatik dan paternalistik juga diperlukan pada masyarakat di Kecamatan Kurau Kabupaten Tanah Laut.

2) Faktor situasi dan kondisi

Faktor situasi dan kondisi juga merupakan hal yang berpengaruh dalam kepemimpinan Camat Kurau. Misalnya suasana musim panen padi, akan berpengaruh terhadap sikap, perilaku dan perbuatan warga masyarakat. Karena situasi hati dan perasaan warga masyarakat yang sedang bergembira menyambut panen yang melimpah. Sebaliknya, situasi dan kondisi bencana alam seperti banjir dan pandemi covid-19 yang lalu, tentu sangat berpengaruh terhadap Kepemimpinan Camat Kurau dalam menjalankan roda Pemerintahan Kecamatan Kurau.

3) Jenis pekerjaan pokok masyarakat

Mayoritas masyarakat di Kecamatan Kuran bekerja sebagai petani. Umumnya para petani adalah orang-orang yang bersikap tawadhu dan religius. Hal ini juga tercermin dalam masyarakat di Kecamatan Kurau. Keadaan ini pada satu sisi dapat berdampak positif dalam kepemimpinan camat, tetapi pada sisi yang lain juga dapat berdampak negatif. Untuk itu, diperlukan adanya gaya dan model kepemimpinan yang tepat dari seorang camat. Maka dari itu, gaya dan model kepemimpinan “demokratis berkharmatik yang paternalistik” adalah pilihan yang tepat pada masyarakat di Kecamatan Kurau.

4) Kualitas SDM para kepala desa dan aparatur pemerintahan desa

Secara umum, kualitas SDM para kepala desa dan aparatur pemerintahan desa dalam wilayah Kecamatan Kurau sudah cukup dan seiring dengan berjalannya waktu, kualitasnya semakin meningkat. Hal ini disebabkan oleh semakin baiknya tingkat pendidikan dari para kepala desa dan aparatur pemerintahan desa, selain itu juga karena semakin banyaknya pelatihan-pelatihan, bimbingan-bimbingan administrasi dan teknis, seminar dan lokakarya, studi tiru, dan lain-lain yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, kementerian dan lembaga, dan pihak-pihak lainnya.

5) Tingkat pendidikan warga masyarakat

Tingkat pendidikan warga masyarakat di Kecamatan Kurau dari waktu ke waktu semakin meningkat. Hal ini selain didukung oleh semakin meningkatnya kesejahteraan hidup warga masyarakat, juga didukung oleh letak geografis Kecamatan Kurau yang dekat dengan pusat-pusat perkotaan, yaitu: Kota Pelaihari (Ibukota Kabupaten Tanah Laut), Kota Martapura (Ibukota Kabupaten Banjar), Kota Banjarbaru (Ibukota Provinsi Kalimantan Selatan) dan Kota Banjarmasin,

yang menyediakan tempat-tempat pendidikan pada semua tingkat mulai dari pendidikan dasar sampai dengan perguruan tinggi.

Selain itu, sudah semakin banyaknya program beasiswa pendidikan dari pemerintah, seperti KIP, beasiswa dari Perintah Kabupaten Tanah Laut, beasiswa dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan beasiswa dari pihak swasta.

6) Kebijakan dan program-program pemerintah

Kebijakan dan program-program pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten juga turut berpengaruh pada kepemimpinan camat. Karena kebijakan dan program pemerintah yang tepat dan dapat dilaksanakan dengan baik, akan berdampak langsung dan tidak langsung kepada gaya dan model kepemimpinan Camat Kurau dalam menjalankan roda Pemerintahan Kecamatan Kurau Kabupaten Tanah Laut.

Model Kepemimpinan Camat Kurau Kabupaten Tanah Laut Dalam Upaya Membangun Kemandirian Desa di Bidang Ekonomi, Sosial, dan Kebudayaan

a) Kepemimpinan Camat dalam Kantor Pemerintah Kecamatan Kurau Kabupaten Tanah Laut

Dalam konteks relasi (hubungan) kepemimpinan camat dengan para aparatur Pemerintah Kecamatan Kurau Kabupaten Tanah Laut, dapat diidentifikasi menjadi beberapa kedudukan dan peran strategis camat, yaitu :

1. Kepemimpinan camat sebagai atasan langsung aparatur Pemerintah Kecamatan Kurau Kabupaten Tanah Laut;
2. Kepemimpinan camat dalam rapat-rapat rutin dan insidentil di tingkat Kecamatan Kurau Kabupaten Tanah Laut;
3. Kepemimpinan camat dalam pelaksanaan tugas-tugas rutin dan insidentil di tingkat Kecamatan Kurau Kabupaten Tanah Laut;
4. Kepemimpinan camat dalam pelaksanaan program-program Pemerintah Pusat di tingkat Kecamatan Kurau Kabupaten Tanah Laut;
5. Kepemimpinan camat dalam pelaksanaan program-program Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan di tingkat Kecamatan Kurau Kabupaten Tanah Laut;
6. Kepemimpinan camat dalam pelaksanaan program-program Pemerintah Kabupaten Tanah Laut di tingkat Kecamatan Kurau; dan
7. Kepemimpinan camat dalam pelaksanaan program-program Pemerintah Kecamatan Kurau Kabupaten Tanah Laut.

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka dapat dikatakan bahwa gaya dan model kepemimpinan Camat Kurau adalah **demokratis yang berkharismatik**. Hal ini dapat dilihat dari perkataan, sikap dan perilaku serta perbuatan Camat Kurau dalam kesehariannya dalam berinteraksi dengan seluruh aparatur

dan staf Pemerintah Kecamatan Kurau Kabupaten Tanah Laut, yaitu sebagai berikut :

- 1) Dalam proses penggerakkan bawahan selalu bertitik tolak dari pendapat bahwa manusia itu adalah makhluk yang termulia di dunia.
- 2) Selalu berusaha mengsinkronisasikan kepentingan dan tujuan organisasi dengan kepentingan dan tujuan pribadi dari para bawahannya.
- 3) Senang menerima saran, pendapat dan bahkan kritik dari bawahannya.
- 4) Selalu berusaha mengutamakan kerjasama dan *teamwork* dalam usaha mencapai tujuan.
- 5) Dengan ikhlas memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada bawahannya untuk berbuat kesalahan yang kemudian dibandingkan dan diperbaiki agar bawahan itu tidak lagi berbuat kesalahan yang sama, akan tetapi lebih berani untuk berbuat kesalahan yang lain. Dalam arti, berani melakukan terobosan-terobosan dan berbagai inovasi serta kreativitas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 6) Selalu berusaha untuk menjadikan bawahannya lebih sukses daripada dirinya. Sehingga lebih mengarah kepada seorang pemimpin yang transformasional.
- 7) Berusaha mengembangkan kapasitas diri pribadinya sebagai pemimpin.

Selain itu, aspek yang menjadi dasar dalam menentukan gaya dan model kepemimpinan Camat Kurau sebagai **demokratis yang berkharismatik** adalah bahwa Camat Kurau selalu dapat dijadikan panutan dan contoh teladan bagi para aparatur Pemerintah Kecamatan Kurau Kabupaten Tanah Laut. Karena Camat Kurau selalu sesuai dan seia sekata antara ucapan dan perkataan dengan perbuatan. Sehingga hal ini dapat meningkatkan motivasi bagi seluruh staf dan aparatur Pemerintah Kecamatan Kurau Kabupaten Tanah Laut.

b) Kepemimpinan Camat dalam Konteks Relasi dengan Para Kepala Desa di Kecamatan Kurau

Kepemimpinan Camat dalam Konteks Relasi dengan Para Kepala Desa di Kecamatan Kurau berdasarkan hasil penelitian ini, maka dapat dikatakan bahwa gaya dan model kepemimpinan Camat Kurau adalah **demokratis berkharismatik yang paternalistik**. Hal ini terlihat dari perkataan, sikap, perilaku dan perbuatan dalam hubungan Camat Kurau dengan para Kepala Desa yang ada dalam wilayah Kecamatan Kurau, yaitu sebagai berikut :

- 1) Dalam proses penggerakkan bawahan selalu bertitik tolak dari pendapat bahwa manusia itu adalah makhluk yang termulia di dunia.
- 2) Selalu berusaha mengsinkronisasikan kepentingan dan tujuan organisasi dengan kepentingan dan tujuan pribadi dari para bawahannya.
- 3) Senang menerima saran, pendapat dan bahkan kritik dari bawahannya.
- 4) Selalu berusaha mengutamakan kerjasama dan *teamwork* dalam usaha mencapai tujuan.
- 5) Dengan ikhlas memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada bawahannya untuk berbuat kesalahan yang kemudian dibandingkan dan diperbaiki agar bawahan itu tidak lagi berbuat kesalahan yang sama, akan tetapi lebih berani untuk berbuat kesalahan yang lain. Dalam arti, berani

melakukan terobosan-terobosan dan berbagai inovasi serta kreativitas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- 6) Selalu berusaha untuk menjadikan bawahannya lebih sukses daripada dirinya. Sehingga lebih mengarah kepada seorang pemimpin yang transformasional.
- 7) Berusaha mengembangkan kapasitas diri pribadinya sebagai pemimpin. Selain itu, model paternalistik terlihat dari hal-hal berikut ini :
 - 1) Menganggap kepala desa sebagai manusia yang masih perlu belajar dan bimbingan, karena tidak ada manusia yang sempurna;
 - 2) Selalu bersikap dan berusaha untuk selalu menjaga dan melindungi para kepala desa dalam batas-batas yang wajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - 3) Dalam hal-hal atau masalah yang urgen, selalu mengharapkan agar para kepala berhati-hati dalam mengambil keputusan; dan
 - 4) Selalu berusaha untuk mengetahui banyak hal agar dapat menjadi manusia yang generalis, sehingga dapat menjadi tempat bertanya bagi para kepala desa.

c) Kepemimpinan Camat dalam Konteks Relasi dengan Warga Masyarakat di Kecamatan Kurau

Kepemimpinan Camat dalam Konteks Relasi dengan Warga Masyarakat di Kecamatan Kurau adalah gaya dan model **demokratis berkharismatik yang paternalistik**; sama dengan *Kepemimpinan Camat dalam Konteks Relasi dengan Para Kepala Desa di Kecamatan Kurau*. Hanya saja perbedaannya pada hal-hal berikut ini, yaitu :

- 1) Menganggap warga masyarakat di Kecamatan Kurau sebagai manusia yang belum dewasa dan harus selalu terus belajar serta perlu bimbingan;
- 2) Selalu bersikap untuk melindungi warga masyarakat di Kecamatan Kurau; dan
- 3) Selalu berusaha untuk menjadi panutan warga masyarakat di Kecamatan Kurau, sehingga Camat Kurau berusaha selalu hadir dan ada ditengah-tengah warga dalam berbagai situasi dan kondisi, seperti pada masa-masa pandemi Covid-19, bencana banjir, kebakaran lahan, selamatan, acara perkawinan, majelis-majelis taklim, *haulan*, dan lain-lain.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Kepemimpinan camat dalam membangun kemandirian desa di Kecamatan Kurau Kabupaten Tanah Laut dalam bidang ekonomi, ada beberapa langkah dan strategi yang dilaksanakan, yaitu: melaksanakan Musrenbangdes, mengoptimalkan pemanfaatan dana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, dan perluasan usaha pertanian secara intensifikasi dan ekstensifikasi.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepemimpinan Camat Kurau Kabupaten Tanah Laut dalam upaya membangun kemandirian desa adalah :

- a) Faktor Internal, yang meliputi :
 - 1) Faktor kemampuan personal;
 - 2) Pendidikan dan pengalaman;
 - 3) Kemampuan dalam berkomunikasi secara internal dan eksternal; dan
 - 4) Kemampuan dari para bawahan.
 - b) Faktor Eksternal, yang meliputi :
 - 1) Struktur sosial ekonomi masyarakat;
 - 2) Faktor situasi dan kondisi;
 - 3) Jenis pekerjaan pokok masyarakat;
 - 4) Kualitas SDM para kepala desa dan aparatur pemerintahan desa;
 - 5) Tingkat pendidikan warga masyarakat; dan
 - 6) Kebijakan dan program-program pemerintah.
3. Gaya dan model Kepemimpinan Camat Kurau Kabupaten Tanah Laut dalam upaya membangun kemandirian desa di bidang ekonomi, sosial, dan kebudayaan adalah:
- a) Kepemimpinan Camat dalam Kantor Pemerintah Kecamatan Kurau Kabupaten Tanah Laut dalam konteks relasi (hubungan) antara camat dengan para aparatur Pemerintah Kecamatan Kurau adalah gaya dan model demokratis yang berkharakteristik.
 - b) Kepemimpinan Camat dalam Konteks Relasi dengan Para Kepala Desa di Kecamatan Kurau adalah gaya dan model demokratis berkharakteristik yang paternalistik.
 - c) Kepemimpinan Camat dalam Konteks Relasi dengan Warga Masyarakat di Kecamatan Kurau adalah gaya dan model demokratis berkharakteristik yang paternalistik.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami Tim Peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Zulpuaddin, S.Sos., selaku Camat Kurau beserta seluruh jajaran Pemerintah Kecamatan Kurau Kabupaten Tanah Laut dan seluruh lapisan masyarakat di Kecamatan Kurau.
2. Bapak Anang Kaderi, selaku Kepala Desa Kurau dan seluruh lapisan masyarakat Desa Kurau Kecamatan Kurau.
3. Bapak Saprudin, selaku Kepala Desa Kali Besar dan seluruh lapisan masyarakat Desa Kali Besar Kecamatan Kurau.
4. Bapak Suardana Pelangi, selaku Kepala Desa Padang Luas dan seluruh lapisan masyarakat Desa Padang Luas Kecamatan Kurau.
5. Para tokoh masyarakat di Kecamatan Kurau Kabupaten Tanah Laut.

Atas segala data, informasi, keterangan, cerita, dan lain-lain yang telah diberikan kepada kami

untuk penyelesaian laporan penelitian ini. Semoga segala jerih payah kita semua dibalas dengan ganjaran pahala yang berlipat ganda dari Allah Swt, Aamiin.

DAFTAR PUSTAKA

- _____. 2000. *Tiga Undang-Undang Politik 1999*. Sinar Grafika.
- _____. 2001. *Penjaga Hati Nurani Pemerintahan. Pusat Kajian Etika Politik dan Pemerintahan (PUKAP) dan Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI)*.
- _____. 2004. *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah*. Sinar Grafika.
- _____. 2004. *Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah*. Sinar Grafika.
- _____. 2014. *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*. Sinar Grafika.
- _____. 2014. *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*. Sinar Grafika.
- _____. 2023. *Kabupaten Tanah Laut Dalam Angka 2023*. BPS Kabupaten Tanah Laut.
- _____. 2023. *Kecamatan Kurau Dalam Angka 2023*. BPS Kabupaten Tanah Laut.
- _____. 1991. *Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah*. Rineka Cipta.
- Anonim, 1999. *Undang-Undang Otonomi Daerah 1999*. Kuraiko Pratama.
- Alfian, M.A., 2016. *Mengapa Politik Menarik Memperbincangkan Urgensi Kepemimpinan Politik*. PT. Penjuru Ilmu Sejati, Bekasi.
- Barnard, C.I., 1982. *Fungsi Eksekutif*. (Penerjemah Ny. Rochmulyati Hamzah). PT Pustaka Binaman Pressindo dan Lembaga Penerbitan dan Pembinaan Manajemen,
- Bateman, T.S. & Scott, A.S., 2009. *Kepemimpinan dan Kolaborasi dalam Dunia yang Kompetitif (Buku 1 dan Buku 2)*. Salemba Empat.
- Cushway, B., 1994. *Human Resource Management (Manajemen Sumber Daya Manusia)*. PTElex Media Komputindo Kelompok Gramedia,
- Djaenuri, H.M.A., 2015. *Kepemimpinan, Etika, & Kebijakan Pemerintahan*. Ghalia Indonesia.
- Garnett, J.L., 1992. *Communicating for Results in Government a Strategic Approach for Public Managers*. Jossey-Bass Publishers.
- Goldhaber, G.M., 1983. *Organizational Communication*. Fourth Edition. Wm. C. Brown Publishers.
- Harsono, 1992. *Hukum Tata Negara Pemerintahan Lokal Dari Masa Ke Masa*. Liberty.
- Henry, N., 1988. *Administrasi Negara dan Masalah-Masalah Kenegaraan*. (Penerjemah Luciana D. Lontoh). Rajawali Press.

- Hersey, P. & Blanchard, K., 1992. *Manajemen Perilaku Organisasi: Pendayagunaan Sumber Daya Manusia*. (Penerjemah Agus Dharma SH, Med.). Erlangga.
- Heywood, A., 2014. *Politik (Alih Bahasa: Ahmad Lintang Lazuardi)*. Pustaka Pelajar.
- Hughes, R.L., Ginnett, & Curphy, 2012. *Leadership Memperkaya Pelajaran dari Pengalaman*. Salemba Humanika.
- Kansil, C.S.T., 1990. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Bumi Aksara.
- Kartono, K., 2001. *Pemimpin dan Kepemimpinan*. PT Grafindo Persada.
- Kossen, S., 1986. *Aspek Manusiawi dalam Organisasi*. (Penerjemah Bakri Siregar). Erlangga.
- Lewis, P.V., 1980. *Organizational Communication: The Essence of Effective Management*. Second Edition. Grid Publishing Inc., Columbus.
- Moehariono, 2014. *Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi*. Jakarta Pers.
- Miftah, T., 2010. *Kepemimpinan Dalam Manajemen*. Rajawali Pers.
- Miles, M.B. & Huberman, A.M., 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Universitas Indonesia (UI-Press).
- Muchtarom, Z., 2000. Konsep Max Weber tentang Kepemimpinan Kharismatik. *Jurnal Refleksi*, II(3).
- Myers, M.T. & Myers, G.E., 1979. *Managing by Communication An Organizational Approach*. McGraw-Hill International Book Company.
- Rasyid, M.R., 1998. *Membangun Pemerintahan Indonesia Memasuki Abad 21*. PT Yarsif Watampone.
- Rogers, E.M. & Rogers, R.A., 1976. *Communication in Organizations*. The Free Press A Division of Publishing Co., Inc.
- Salusu, J., 1998. *Pengambilan Keputusan Strategik Untuk Organisasi Publik dan Organisasi Nonprofit*. PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Thoha, M., 1991. *Perspektif Perilaku Birokrasi (Dimensi-dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara)*. Rajawali Pers.
- Wirawan, 2014. *KEPEMIMPINAN (Teori, Psikologi, Perilaku Organisasi, Aplikasi dan Penelitian)*. PT Raja Grafindo Persada.
- Yudoyono, B., 2001. *Otonomi Daerah Desentralisasi dan Pengembangan SDM Aparatur Pemda dan Anggota DPRD*. Pustaka Sinar Harapan.
- Yukl, G., 2010. *Kepemimpinan Dalam Organisasi*. PT Indeks Permata Putri Media Kembang Utara.